

R E N J A

2024



**BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Kesbangpol baik dalam merumuskan kegiatan maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Bone, 08 Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah	27
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kab Bone	27
3.3 Cascading Kinerja.....	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KESBANGPOL	33
BAB V : PENUTUP	45
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone 2023 ; a. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ; c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah ; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone. Tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2024 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2014 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan Badan KesbangdanPolitk di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keterkaitan antara Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;

1. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Cascading Kinerja

Berisi mengenai Tujuan, Sasaran, sampai dengan Outcome dan Output Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kelompok Sasaran Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BAGSA DAN POLITK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone adalah penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada Tahun 2024 ditetapkan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan urusan wajib. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
- B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 13.944.899.523,- Dengan nilai pagu partial I sebesar Rp 9.523.274.223,- terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan capaian kinerja fisik sebesar 17,12% dan capaian kinerja keuangan sebesar 14,98%.

NO	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				KEUANGAN	%
	5	BELANJA	9,523,274,223	1,426,518,231	14,98
1	801.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,375,890,968	808,952,013	18,94
1.1	801.01.201	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	67,632,250	1,040,000	1,54
1.1.1	801.01.201.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4,352,500	-	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	1,472,500	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	0	0,00
1.1.2	801.01.201.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11,730,000	-	0,00
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	950,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan – Natura	15,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,160,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,600,000	0	0,00
1.1.3	801.01.201.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1,040,000	1,040,000	100
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	560,000	560,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000	480,000	100
1.1.4	801.01.201.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	980,000	-	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	500,000	0,00	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000	0,00	0,00
1.1.5	801.01.201.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	49,529,750	-	0,00
	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	614,500	0	0,00
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,360	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,890,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	666,190	0	0,00
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,009,200	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,020,000	0	0,00
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,323,500	0	0,00
	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lain	30,000,000	0	0,00
1.2	801.01.202	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,846,436,918	589,166,007	20,70
1.2.1	801.01.202.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2,846,436,918	589,166,007	20,70
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,391,229,735	373,037,100	26,81
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,668,684	29,966,966	26,84
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131,580,750	35,300,000	26,83
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	142,539,600	28,740,000	20,16
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13,791,750	3,700,000	26,83
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	66,946,496	17,960,160	26,83
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	4,039,894	1,115,903	27,62
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,615	4,944	3,35
	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	69,819,355	18,829,761	26,97
	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,338,975	895,296	26,81
	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10,016,896	2,685,876	26,81
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	530,326,716	44,868,508	8,46
	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	76,785,924	6,381,387	8,31
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	294,204,528	25,680,106	8,73
1.3	801.01.205	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15,576,000	-	0,00
1.3.1	801.01.205.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15,576,000	-	0,00
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	15,576,000	0	0,00
1.4	801.01.206	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	963,336,400	107,074,559	11,11
1.4.1	801.01.206.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	175,255,850	9,364,851	5,34
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18,308,930	2,186,391	11,94
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	48,613,400	1,729,750	3,56
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,095,000	195,500	3,21
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	56,500,000	500,000	0,88
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38,441,250	3,825,500	9,95
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7,297,270	927,710	12,71
1.4.2	801.01.206.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	275,748,000	18,328,000	6,65
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	275,748,000	18,328,000	6,65
1.4.3	801.01.206.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40,576,550	1,050,000	2,59
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	25,576,550	0	0,00
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15,000,000	1,050,000	7,00
1.4.4	801.01.206.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7,680,000	180,000	2,34
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,680,000	180,000	2,34
1.4.5	801.01.206.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	464,076,000	78,151,708	16,84
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	388,926,000	66,151,708	17,01
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,150,000	12,000,000	15,97
1.6	801.01.208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	390,629,400	91,710,538	23,48
1.6.1	801.01.208.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14,399,400	3,591,538	24,94
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2,399,400	0	0,00
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,000,000	3,591,538	29,93

1.6.2	801.01.208.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	376,230,000	88,119,000	23,42
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	111,276,000	27,819,000	25,00
	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengellaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7,200,000	1,800,000	25,00
	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	126,000,000	27,000,000	21,43
	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	84,000,000	21,000,000	25,00
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18,000,000	4,500,000	25,00
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24,000,000	6,000,000	25,00
	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5,754,000	0	0,00
1.7	801.01.209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92,280,000	19,960,909	21,63
1.7.1	801.01.209.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	66,750,000	19,960,909	29,90
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42,000,000	10,884,385	25,92
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,750,000	512,500	7,59
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18,000,000	8,564,024	47,58
1.7.2	801.01.209.09	PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	25,530,000	-	0,00
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	610,000	0	0,00
	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer	12,500,000	0	0,00
	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12,420,000	0	0,00
2	801.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	278,108,700	36,740,325	13,21
2.1	801.02.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	278,108,700	36,740,325	13,21
2.1.1	801.02.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN , BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMABURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	61,225,700	5,291,200	8,64
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,330,700	0	0,00
	5.1.02.02.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,900,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,962,000	2,441,200	30,66
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,000,000	2,850,000	13,57
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0	0,00
2.1.2	801.02.201.02	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	73,709,000	10,072,800	13,67
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	821,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9,700,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,988,000	7,672,800	40,41
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,800,000	2,400,000	9,30
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0	0,00
2.1.3	801.02.201.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	80,490,000	10,263,125	12,75
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	308,100	0	0,00
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	627,900	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,330,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,380,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,800,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,194,000	9,213,125	43,47
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,450,000	1,050,000	4,90
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,000,000	0	0,00
2.1.4	801.02.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	62,684,000	11,113,200	17,73
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,666,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27,700,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,418,000	8,263,200	40,47
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000	2,850,000	33,93

3	801.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,448,319,555	31,242,755	2,16
	801.03.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1,448,319,555	31,242,755	2,16
	801.03.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	77,235,000	10,214,800	13,23
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	119,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	50,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	150,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Posa	210,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,600,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7,750,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,906,000	10,064,800	21,46
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,750,000	150,000	1,18
	801.03.201.02	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK,PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1,326,942,555	9,964,755	0,75
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	189,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	300,000	5,56
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67,500,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,836,000	8,764,755	42,07
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	900,000	85,71
	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,231,967,555	0	0,00
	801.03.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI	44,142,000	11,063,200	25,06
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,954,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,666,000	9,263,200	29,25
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	1,800,000	17,14
	801.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1,533,130,000	39,981,474	2,61
	801.04.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1,533,130,000	39,981,474	2,61
	801.04.201.05	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	1,533,130,000	39,981,474	2,61
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	294,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,140,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	1,000,000	1,000,000	100
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,430,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,850,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,800,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27,200,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,666,000	36,131,474	53,40
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,750,000	2,850,000	15,20
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,000,000	0	0,00
	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400,000,000	0	0,00
	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	985,000,000	0	0,00
	801.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	108,883,550	20,840,200	19,14
	801.05.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	108,883,550	20,840,200	19,14

	801.05.201.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	84,232,000	12,080,000	14,34
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	797,000	334,000	41,91
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,257,000	616,000	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,750,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,100,000	1,110,000	52,86
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,800,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,728,000	6,120,000	12,06
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,800,000	3,900,000	50,00
	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,000,000	0	0,00
	801.05.201.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	24,651,550	8,760,200	35,54
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	577,550	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	160,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	3,600,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	840,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,074,000	4,560,200	41,18
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000	4,200,000	50,00
	801.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,778,941,450	488,761,464	27,47
	801.06.201	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,778,941,450	488,761,464	27,47
	801.06.201.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING,KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	245,874,000	38,358,000	15,60
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	299,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,440,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,100,000	11,025,000	25,00
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	78,200,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1,600,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	2,000,000	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110,916,000	25,683,000	23,16
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	1,650,000	31,43
	801.06.201.02	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING,KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	228,224,000	46,790,399	20,50
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	595,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,680,000	3,780,000	16,67
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	181,200,000	30,200,000	16,67
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,116,000	11,610,399	57,72
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	1,200,000	33,33
	801.06.201.03	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING,TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	83,799,450	3,912,000	4,67
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,010,950	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,000,000	0	0
	5.1.02.02.01.0003		12,700,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0004		7,500,000	0	0,00
	5.1.02.02.01.0007		400,000	0	0,00
	5.1.02.02.04.0117		3,802,500	0	0,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,806,000	3,912,000	8,73
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	0
	801.06.201.06	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,221,044,000	399,701,065	32,73
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	177,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,275,000	0	0,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81,000,000	16,650,000	20,56
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	775,800,000	249,000,000	32,10

	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357,542,000	132,101,065	36,95
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	1,950,000	86,67
		JUMLAH	9,523,274,223	1,426,518,231	14,98

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai sebagai indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Disamping itu Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Bone Tahun 2024 – 2026, (Tabel TC.30) sebagai berikut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun 2018-2023					Rasio Capaian Tahun 2018-2023				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Persentase ormas dan LSM yang berpartisipasi aktif				25%	47%	52%	57%	62%	25%	47%	61%	71%	-	100%	100%	117%	125%	-
2	Persentase Orpol yang berpartisipasi aktif				80%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	-	100%	100%	80%	100%	-
3	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif				80%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat pelatihan Bela Negara				5,6	6,7	7,8	8,8	9,8	5,6	6,7	5,7	5,7	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Persentase Konflik bernuansa SARA yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP				CC	B	B	BB	BB	CC	BB	BB	BB	-	B	BB	BB	BB	-

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategis yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan. Secara rinci, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone diuraikan dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
2. Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
3. Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Permasalahan

Beberapa Permasalahan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sebagai berikut :

- ♦ Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan tools pengukuran kinerja
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA
- ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal
- ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga Pendidikan politik tidak merata

Dampak

- Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
- Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terpecah.
- Isu terorisme yang terkait dengan masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan/kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

2. Masih terdapat penyakit masyarakat (pekat) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan narkoba, illegal logging, pengguna minuman keras(miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
3. Belum optimalnya nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi yang tidak terbendung.
4. Munculnya isu- isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
5. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik

Peluang

1. Perkembangan politik yang semakin demokratis, memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, melalui LSM/ormas dan partisipasi masyarakat
2. Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri yang kondusif membawa ketenteraman dalam masyarakat
3. Pendidikan Politik Masyarakat yang cukup baik, meningkat mendorong peningkatan minat masyarakat menjadi anggota legislatif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC – 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec . TR Barat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	100 Persen	4,961,524,457	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec . TR Barat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	100 Persen	4.375.890.968	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	100 Persen	12,386,770	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun	100 Persen	67.632.250	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4,393,510	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4,352,500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,392,105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11,730,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	759,578	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,040,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	759,578	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	980,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	5,082,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	49,529,750	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

			SKPD					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.463.520.684	Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,846,436,918		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	2,921,558,760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	2,846,436,918		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	100 Persen	55,550,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	100 Persen	15,576,000		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58 Paket	31,350,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58 Paket	15,576,000		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec . TR Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	24,200,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec . TR Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0		
	Administrasi Umum	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	838,001,395	Administrasi Umum	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	963,336,400		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	256,509,330	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 Paket	175,255,850		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	66,959,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kamntor	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	12 Paket	275,748,000		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,701,765	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec . TR Barat	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Keuangan Selama Setahun	12 Paket	40,576,550		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	48,180,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Dokumen	7,680,000		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	430,651,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang &Cetakan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan	600 Laporan	464,076,000		

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	214,731,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	0	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 unit	110,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 unit	0	
2	Pengadaan Mebel	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	52,756,000	Pengadaan Mebel	Kec . TR Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Paket	0	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	51,975,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	0	
4	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300,000,000	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Kec . TR Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	475,653,420	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	390,629,400	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	36,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	14,399,400	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	439,353,420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376,230,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	443,643,112	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec . TR Barat	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	92,280,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kec . TR Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	22 Unit	157,081,716	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau	Kec . TR Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	66,750,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	195 Unit	157,081,716	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	195 Unit	25,530,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	129,479,680	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec . TR Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kec . TR Barat	Presentase peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan (%)	90 Persen	664,665,705	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kec . TR Barat	Presentase peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan (%)	90 Persen	278,108,700	
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kec . TR Barat	Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	90 Persen	664,665,705	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kec . TR Barat	Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	90 Persen	278,108,700	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	82,654,737	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	61,225,700	
12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	98,338,273	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	73,709,000	
3	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 Orang	121,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 Orang	0	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	9 Orang	310,809,675	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	9 Orang	80,490,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	51,863,020	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	62,684,000		
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kec . TR Barat	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100 Persen	1,752,160,774	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kec . TR Barat	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100 Persen	1,448,319,555		
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1,752,160,774	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1,448,319,555		
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta	2 Dokumen	115,321,250	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan	2 Dokumen	77,235,000		

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Pemantauan Situasi Politik		Pemantauan Situasi Politik yang Disusun					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun				
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah yang Disusun	1 Dokumen	1,459,636,811	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah yang Disusun	1 Dokumen	1,326,942,555		
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang	55,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang	0		
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang	75,353,714	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Orang	0		
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1 Laporan	46,849,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	1 Laporan	44,142,000		

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah			
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kec . TR Barat	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	85 Persen	958,670,416	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kec . TR Barat	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	85 Persen	1,533,130,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kec . TR Barat	Prosentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85 Persen	958,670,416	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kec . TR Barat	Prosentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85 Persen	1,533,130,000	
1	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	20 Dokumen	55,000,000	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	20 Dokumen	0	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	49,500,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	
3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	38,500,000	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	0	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

4	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	60,500,000	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	0	
5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	755,170,416	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1,533,130,000	
V	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kec . TR Barat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	90 Persen	234,071,173	PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kec . TR Barat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	90 Persen	108,883,550	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90 Persen	234,071,173	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kec . TR Barat	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90 Persen	108,883,550	
1	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	16,500,000	Penyusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	22,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kec . TR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	10 Orang	22,101,173	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Kec . TR	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	10 Orang	0	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Barat	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Barat	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 Orang	136,400,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 Orang	84,232,000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	37,070,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	24,651,550	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kec . TR Barat	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	90 Persen	2,831,342,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kec . TR Barat	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	90 Persen	1,778,941,450	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Persentasen Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90 Persen	2,831,342,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kec . TR Barat	Persentasen Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90 Persen	1,778,941,450	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Dokumen	82,500,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan	Dokumen	245,874,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
2	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	310,135,400	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	228,224,000	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	302,500,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	83,799,450	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	136,197,600	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	134,624,600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec . TR Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,865,384,400	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kec . TR Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,221,044,000	
JUMLAH					11,402,434,525					9,523,274,223	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain daripada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait kebijakan nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kab.Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kab. Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

Berdasarkan isu-isu strategis yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka rumusan pernyataan Tujuan Bakesbangpol Kabupaten Bone Periode Tahun 2024 - 2026, sesuai dengan Tujuan RPD yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan 1 RPD
- Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan**
- Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi
- Tujuan Renstra
- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesatuan Bangsa**
- Indikator: Nilai SAKIP Kabupaten

2. Tujuan 2 RPD

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif

Indikator: Persentase Penduduk Miskin

Tujuan Renstra

Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesatuan Bangsa

Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa

Sasaran RPD Bakesbangpol Kabupaten Bone

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Rencana Pembangunan Daerah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rumusan pernyataan Sasaran Bakesbangpol sesuai dengan Sasaran RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026,yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran 1 RPD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator: Nilai SAKIP Kabupaten

Sasaran Renstra

Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol

Indikator: Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP

2. Sasaran 2 RPD

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Indikator: Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran Renstra

Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	IndikatorTujuan/Sasaran
1	2	4
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesatuan Bangsa
		2. Nilai Evaluasi SAKIP Oleh APIP

3.4 CascadingKinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

Tahun 2024

CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2024-2026 BAKESBANGPOL KAB. BONE						
TUJUAN RPD KAB. BONE 2024-2026	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif			Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan		
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Penduduk Miskin			Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN RPD KAB. BONE 2024-2026	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai SAKIP Kabupaten		
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dalam Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa					
INDIKATOR TUJUAN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa			Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP		
SASARAN RENSTRA	Mewujudkan Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Masyarakat			Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol		
INDIKATOR SASARAN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesatuan Bangsa			Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP		
PENANGGUNG JAWAB SASARAN	BAKESBANGPOL					
PROGRAM	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakarat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN PROGRAM	Menguatkan Peran Parpol dan Masyarakat Dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatkan Partisipasi Ormas dalam Pembangunan Daerah	Terjaganya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat	Terciptanya Kewaspadaan Diri dan Stabilitas Keamanan Lingkungan Masyarakat Terhadap Potensi Gangguan Ideologi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Kualitas Pelayanan Publik Untuk Meminimalisir Terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Bakesbangpol
INDIKATOR PROGRAM	% Parpol yang Berperan Aktif dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% Ormas yang Terdaftar Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kondisi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Tingkat Penilaian Masyarakat Dalam Penguatan Ideologi Pancasila		Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Kepala Bidang Poitik Dalam Negeri	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik	SEKRETARIS	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

KEGIATAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah
INDIKATOR KEGIATAN	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	% Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah
HASIL KEGIATAN	Jumlah Masyarakat yang Telah Mengikuti Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Dalam Mewujudkan Visi/Misi Pemerintah Daerah	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pendidikan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Sosial	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Secara Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik
KELUARAN KEGIATAN	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Keberadaan serta Bantuan Fasilitas Ormas/LSM	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan/Kebijakan Di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang Tersusun	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi & Sub Koordinator Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan & Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan & Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa	Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen & Sub Koordinator Penanganan Konflik	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian						

KEGIATAN	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN I	Pengusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pengusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengusunan Program Kerja Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalihan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pengusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakalan Dinas Kelengkapannya	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SASARAN SUB KEGIATAN I	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalihan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pakajanya
SUB KEGIATAN 2	Pengusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pengusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pengusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Mebel
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tersedianga Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianga Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianga Peralatan Rumah Tangga	Tersedianga Mebel	Tersedianga Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Mebel yang Dipelihara
SUB KEGIATAN 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 3	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianga Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Tersedianga Bahan Logistik Kantor	Tersedianga Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
SUB KEGIATAN 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 4	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianga Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Tersedianga Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianga Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperagaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

SUB KEGIATAN 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Vawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Vawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	terserangnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Pengalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Vawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
SUB KEGIATAN 6				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Kunjungan Tamu					
SASARAN SUB KEGIATAN 6				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu					
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					
SUB KEGIATAN 7				Pembentukan Paskibraka			Pengelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
SASARAN SUB KEGIATAN 7				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka			Terlaksananya Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
INDIKATOR SUB KEGIATAN 7				Jumlah Paskibraka			Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
SUB UNIT KERJA PERANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN				Kasubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut	Kasubag. Umum & Kepegawaian	Kasubag. Keuangan	Kasubag. Umum & Kepegawaian					
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Mahasiswa, Pelajar dan Tokoh Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan / LSM, Pasar	Pelajar, ASN dan Tokoh Masyarakat	Mahasiswa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Keuangan Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Diklat & Bimtek Bagi Pegawai Bakesbangpol	Pelayanan Administrasi Umum Bakesbangpol	Barang Milik Daerah Pada Bakesbangpol	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Bakesbangpol	Barang Milik Daerah Pada Bakesbangpol
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. DPRD Kab. Bone 6. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan 7. KPU 8. BAWASLU	1. Masyarakat Umum 2. Bupati & Wakil Bupati Bone 3. Sekretaris Daerah Kab. Bone 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 5. Pemerintah Desa 6. DPRD Kab. Bone 7. KEMENAG 8. BNN	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. Etnis 6. Kementerian Terkait	1. Forkopinda 2. Forkopimcam 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Kementerian Terkait 5. Aparat Penegak Hukum (TM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. DISKOMINFO Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 6. Lembaga Diklat Resmi bagi ASN	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. UKPBJ Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. UKPBJ Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. UKPBJ Kab. Bone 4. BPPK Kab. Bone 5. BPK-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 5. BPPK Kab. Bone 7. Penyedia Barang/Jasa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

4.1 Fator-Faktor Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Rekapulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Tahun 2024

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih menitik beratkan pada hal peningkatan ketertiban dan kenyamanan melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Basional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :

NO.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan

			<div>Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div> <div>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div> <div>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</div>
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sera Budaya Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	<div>Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik</div> <div>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</div>
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasana Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas, Evaluasi dan Mendiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<div>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</div> <div>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</div>
5	Program Peningkatan Kewaspadaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,

	Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyedian Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyedian Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2024 merencanakan 6 (Enam) Program serta 11 (Sebelas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2) Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, terdiri dari 3 Sub Kegiatan
 - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan Situasi Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasana Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan disertakan lampiran yang ada dibawah ini:

Tabel 3.3
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

SKPD : 8-01.0-0.0-0.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8									68,028,274,223				74,831,101,645
8	01								68,028,274,223				74,831,101,645
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	3,829,931,668			100 Persen	4,212,924,835
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	22,000,000			100 Persen	24,200,000
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen	11,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	12,100,000
9.530.000	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Laporan	11,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	12,100,000
2.694.656.633	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	2,846,306,838			100 Persen	3,130,937,522
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	24 Orang/Bulan	2,846,306,838	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/Bulan	3,130,937,522
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	1,000,000			100 Persen	1,100,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

					Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	550,000
8	01	01	2.03	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	550,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	461,130,830			100 Persen	507,248,313
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	76,416,180	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	84,057,798
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	30,076,650	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	33,084,315
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	4,800,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	5,280,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	800 Laporan	349,842,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		850 Laporan	384,826,200
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	393,030,000			100 Persen	432,333,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	48 Laporan	12,000,000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Rekening	13,200,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Laporan	381,030,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	419,133,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	106,460,000			100 Persen	117,106,000
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Tanete Riattang Barat	17 Unit	65,500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	72,050,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanete Riattang Barat	22 Unit	15,960,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Paket	17,556,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Unit	25,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	27,500,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penilaian Masyarakat Dalam Penguatan Ideologi Pancasila	Kec. Tanete Riattang Barat	90 Persen	310,925,000			95 Persen	342,017,500
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pendidikan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kec. Tanete Riattang Barat	400 Orang	310,925,000			400 Orang	342,017,500
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah DokumenProgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	10,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11,000,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	5,519,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6,070,900
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Orang	5,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Orang	5,500,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kec. Tanete Riattang Barat	400 Orang	25,446,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	27,990,600
8	01	02	2.01	08	Pembentukan PAskibraka	Jumlah Paskibraka	Kec. Tanete Riattang Barat	70 Orang	264,960,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	291,456,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Berperan Aktif dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	Kec. Tanete Riattang Barat	67 Persen	61,466,167,555			67 Persen	67,612,784,311

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang Telah Mengikuti Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Orang	61,466,167,555			120 Orang	67,612,784,311
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	61,326,942,555	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	67,459,636,811
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	139,225,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	153,147,500
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Terdaftar dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	Kec. Tanete Riattang Barat	80 Persen	950,000,000			85 Persen	1,045,000,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Dalam Mewujudkan Visi&Misi Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	950,000,000			100 Persen	1,045,000,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	950,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	1,210,000,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kondisi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Kec. Tanete Riattang Barat	100 Persen	55,000,000			100 Persen	825,000,000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kec. Tanete Riattang Barat	80 Persen	55,000,000			82 Persen	825,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	27 Orang	35,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang	38,500,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 laporan	20,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	22,000,000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Kualitas Pelayanan Publik Untuk Meminimalisir Terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat	Kec. Tanete Riattang Barat	85 Persen	1,416,250,000			87 Persen	1,557,875,000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Sosial	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	1,416,250,000			1 Laporan	1,557,875,000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	127,643,000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	140,407,300
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	227,799,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250,578,900
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	11 Orang	126,886,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang	139,574,600
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	933,922,000	[DANA UMUM] - DanaTransfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,027,314,200

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2024.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas ,harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan.
6. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator prosentase lembaga kemaanan yang berperan aktif dan Peningkatan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memberikan kemudahan kepada Aparat keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam hal ini semua stakeholder terkait dan para FORKOPIMDA dalam kegiatan penyiapan tenaga pengendali kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, ini merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan masyarakat dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Bone dalam menjaga NKRI.